

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN



RENCANA KERJA
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Jl. Gajah Mada No. 116 Praya 83511
Email: dishub.lomboktengahkab@gmail.com
Website: perhubungan.lomboktengahkab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini menyajikan informasi rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan harapan agar program dan kegiatan yang akan dilakukan memiliki hasil yang lebih baik dan terukur, sehingga akan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan informasi kinerja SKPD sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Praya, 20 September 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Loteng	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN Lombok Tengah	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	30
3.3 Program dan Kegiatan.....	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	35
BAB V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun Anggaran 2020.....	8
Tabel 2.3	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan.....	16
Tabel 2.4	Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan	19
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	23
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	31
Tabel 4.1	Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menjadi salah satu dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dengan memperhatikan keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis, dan partisipatif politis, perencanaan *bottom-up* serta perencanaan *top-down*.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dikerjakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja SKPD adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan strategis jangka pendek SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD. Disebutkan juga bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun

berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai pedoman rencana kerja yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Adapun *output* dan *outcome* untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit

kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yaitu Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam waktu satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran RKPD Kabupaten Lombok Tengah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan. Selain itu agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah dan terukur sesuai dengan kemampuan Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan yang telah digariskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, serta Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra), Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
(TAHUN ANGGARAN 2020)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menangani urusan perhubungan dengan jenis pelayanan dasar bidang perhubungan yang meliputi: jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, penyediaan sumber daya manusia di bidang terminal dan pengujian kendaraan bermotor, serta keselamatan. Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah beserta kewenangannya seperti yang tertuang pada Perbup di atas. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 terdapat dua jenis Belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi daerah. Sedangkan Belanja Langsung terdiri atas 5 (lima) program dengan 15 (lima belas) kegiatan yang merupakan anggaran operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun jumlah realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 4.833.581.800,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.148.122.466,00 atau mencapai 93,89% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.433.386.366,00	3.137.664.201,00	295.722.165,00	91,39
2	Belanja Langsung	1.714.736.100,00	1.695.917.599,00	18.818.501,00	98,90
	Jumlah	5.148.122.466,00	4.833.581.800,00	314.540.666,00	93,89

Sumber: LRA Dishub TA. 2020

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun Anggaran 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Thn 2019 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
		Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																								
		Bidang Urusan : Perhubungan - Dinas Perhubungan																								
1	2.9.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	100.00	264.004.300		124.735.550	100.00	74.612.500		42.116.000		16.257.000		12.030.000		4.209.500		74,612,500							
	2.9.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan akhir DAK	5 persen	264.004.300	3	124.735.550	1.00	74.612.500	0	42.116.000	0	16.257.000	0	12.030.000	1	4.209.500	1	74.612.500	100	100	4	199.348.050	80%	75.51	
			Dokumen laporan bulanan	60 persen		36		12.00		3		3		3		3		12		100		48		80%		
			dokumen laporan LKJIP, LPPD	10 persen		6		2.00		2		0		0		0		2		100		8		80%		
			Dokumen laporan semesteran	10 persen		6		2.00		0		1		0		1		2		100		8		80%		
			dokumen laporan triwulan	20 persen		12		4.00		1		1		1		1		4		100		16		80%		

			dokumen laporan triwulan DAK	20 persen		12		4.00		1		1		1		1		4		100		16		80%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100%	100%			40%	75.51%
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah
2	2.9.1.37	Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan	Angka kecelakaan lalu lintas	130.00	57.327.852.550		4.647.064.004	130.00	888.029.850		173.526.100		407.015.200		191.097.500		81.709.750		853,348,550						
	2.9.1.37.13	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Jalan Raya	Pengamanan dan pengawalan haji, pejabat tamu safari ramadhan dan pengamanan lebaran dan hari-hari besar lainnya tahun baru dan expo	60	5.120.710.000	36	929.752.000	12.00	105.517.000	3	28.969.250	3	29.914.000	3	31.140.000	3	15.493.750	12	105.517.000	100	100	48	1.035.269.000	80%	20.22
	2.9.1.37.14	Penataan Lalu Lintas Kawasan	Operational forum LLAJ pengamanan rawan pagi, rawan siang, rawan pasar dan pengaman bau nyale	60	5.216.000.000	36	582.570.500	12.00	82.310.850	3	24.142.350	3	24.763.700	3	25.877.500	3	7.527.300	12	82.310.850	100		48	664.881.350	80%	12.75
	2.9.1.37.15	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah kendaraan yang diuji(kir)	38	9.006.419.000	23	589.805.000	8.00	444.240.000	2	43.900.000	0	207.000.000	3	110.800.000	1	51.100.000	7.05	412.800.000	88.13	92.92	30.05	1.002.605.000	79.08%	11.13
			Kalibrasi sarana dan prasarana PKB	1		1		1.00		0		0		0	1		1		100		2		200%		
			Pengaspalan saranan dan prasaranan PKB	1		1		1.00		1		0		0	0		1		100		2		200%		

			SIM sarana dan prasarana PKB	1		1		0.00		0		0		0		0		0		0		1		100%	
2.9.1.37.8	Pengadaan Fasilitas sarana dan prasarana Keselamatan Jalan		cermin tikungan	9	36.589.723.550	4	2.544.936.504	0.00	255.962.000	0	76.514.500	0	145.337.500	0	23.280.000	0	7.588.700	0	252.720.700	0	98.73	4	2.797.657.204	44.44%	7.65
			ketersediaan rambu jumlah kebutuhan pada jalan kabupaten	475		275		0.00		0		0		0		0						275		57.89%	
			marka	5		0		0.00		0		0		0		0						0		0%	
			pagar pengaman jalan	186		60		0.00		0		0		0		0						60		32.26%	
			patok tikungan	390		190		0.00		0		0		0		0						190		48.72%	
			rambu jalan	475		275		0.00		0		0		0		0						275		57.89%	
			RPPJ	27		22		0.00		0		0		0		0						22		81.48%	
			traffic coen, rambu pengalih arus, road barear, dll	397		124		0.00		0		0		0		0						124		31.23%	
			traffic light	4		0		0.00		0		0		0		0						0		0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			97.63%	97.91%			34.64%	12.94%	

Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	2.9.1.38	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rasio kendaraan per jumlah penumpang	40.00	11.863.460.930		13.316.066.405	40.00	278.871.600		63.682.100		73.322.350		69.757.950		70.829.200		277.591.600						
	2.9.1.38.15	Penertiban Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Parkir	140	1.114.509.530	86	131.952.600	25.00	131.952.600	5	24.289.000	7	47.299.950	8	43.929.950	5	15.153.700	25	130.672.600	100	99.03	111	262.625.200	79.29%	23.56
			Terminal Shelter	4		1		1.00		1		0		0		0		1		100		2		50%	
	2.9.1.38.16	Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Angkutan	Bus Perintis	12	1.062.662.400	5	81.299.000	0.00	81.299.000	0	13.333.900	0	17.098.900	0	17.985.000	0	32.881.200	0	81.299.000	0	100	5	162.598.000	41.67%	15.3
			Pengawasan dan penertiban angkutan	408		216		96.00		24		24		24		24		96		100		312		76.47%	
			Rekomendasi perizinan bidang perhubungan (perubahan plat nomor dan izin trayek / non trayek)	10		6		2.00		0		0		0		2		2		100		8		80%	
			sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan	34		24		6.00		6		0		0		0		6		100		30		88.24%	
	2.9.1.38.3	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Alat sarana dan prasarana angkutan laut dan keselamatan pelayaran	90	9.686.289.000	10	13.102.814.805	0.00	65.620.000	0	26.059.200	0	8.923.500	0	7.843.000	0	22.794.300	0	65.620.000	0		10	13.168.434.805	11.11%	135.95
			Dermaga tambatan perahu	6		4		0.00		0		0		0		0		0		0		4		66.67%	
			Dokumen perizinan angkutan perairan	1		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0%	

			Patroli keselamatan pelayaran	120		24		48.00		12		12		12		12		48		100		72		60%			
			Speed boat	8		4		0.00		0		0		0		0		0		0		4		50%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100%	99.68%					26.19%	58.27%
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Rendah	Sangat Rendah
4	2.9.1.101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase layanan administrasi kantor	100.00	1.521.186.000		775.856.619	100.00	308.214.150		140.817.090		51.629.086		46.181.173		57.001.780		295.629.129								
	2.9.1.101.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa air	60 persen	38.600.000	36	152.138.025	12.00	81.300.000	3	11.514.675	3	12.578.586	3	11.291.223	3	36.024.458	12	71.408.942	100	139.2	48	223.546.967	80%	579.14		
			Jasa internet	60 persen		36		12.00		3		3		3		3		12		100		48		80%			
			Jasa listrik	60 persen		36		12.00		3		3		3		3		12		100		48		80%			
	2.9.1.101.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan	60 persen	253.191.000	36	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	60%	0		
	2.9.1.101.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	60 persen	160.500.000	36	94.548.200	12.00	87.270.000	3	27.740.000	3	28.940.000	3	25.390.000	3	5.200.000	12	87.270.000	100	100	48	181.818.200	80%	113.28		
	2.9.1.101.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bangku	2 persen	298.440.000	0	80.722.350	0.00	48.600.000	0	33.777.000	0	8.200.000	0	2.350.000	0	4.250.000	0	48.577.000	0	99.95	0	129.299.350	0%	43.33		
			kursi kerja/rapat	63 persen		13		0.00		0		0		0		0		0		0		13		20.63%			

			Kursi tamu	5 persen		3		0.00		0		0		0		0		0		3		60%				
			Lemari	14 persen		5		1.00		0		1		0		0		1		100		6		42.86%		
			Meja	5 persen		2		0.00		0		0		0		0		0		0		2		40%		
	2.9.1.101.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Petugas Kebersihan Kantor dan Kebersihan Halaman Kantor	2 persen	128.625.500	2	35.796.600	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	35.796.600	100%	27.83		
	2.9.1.101.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	250 persen	559.590.000	131	356.172.444	25.00	52.381.150	10	35.202.415	0	1	5.090.700	8	9.442.072	19	49.735.187	76	94.95	150	405.907.631	60%	72.54		
	2.9.1.101.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	60 persen	82.239.500	36	56.479.000	12.00	38.663.000	3	32.583.000	3	1.910.500	3	2.059.250	3	2.085.250	12	38.638.000	100	99.94	48	95.117.000	80%	115.66	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			96.57%	96.53%			21.08%	169.24%		
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5	2.9.1.102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana dan prasarana aparaturn kondisi baik	100.00	1.448.282.650		640.310.763	100.00	195.008.000		104.875.461		67.004.350		11.352.000		11.504.009		194.735.820							
	2.9.1.102.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas operational	1 persen	360.000.000	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	2.9.1.102.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operational	187 persen	720.000.000	117	640.310.763	48.00	195.008.000	38	104.875.461	10	67.004.350	0	11.352.000	0	11.504.009	48	194.735.820	100	99.86	165	835.046.583	88.24%	115.98	

2.9.1.102.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor	12 persen	368.282.650	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	99.86%			51.34%	115.98%
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program				19,504,033,341	1,744,736,100	525,016,751	615,227,986	330,418,623	225,254,239	1,695,917,599	0	30.09%		0	0%	0%					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM(%)																61.89%	69.36%			0%	0%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			0	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :																					

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dikemukakan beberapa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

a. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang Direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah direncanakan, yaitu pada kegiatan:

1. Kegiatan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan;

Pada tahun 2020, jumlah fasilitas keselamatan jalan yang direncanakan pada kegiatan ini dengan bersumber dari Dana Alokasi Khusus meliputi:

- pengadaan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Puyung – Bonjeruk sebanyak 80 buah;
- pengadaan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Batunyale – Sengkol sebanyak 83 buah;
- pengadaan RPPJ pada ruas jalan Bonjeruk – Sintung sebanyak 7 unit;
- pengadaan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Puyung – Bonjeruk sebanyak 70 meter

Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena seluruh anggaran kegiatan yang bersumber dari dana DAK mengalami *refocusing* dan realokasi untuk mengatasi pandemi Covid-19. Sehingga target yang direncanakan pada indikator jumlah fasilitas keselamatan jalan tersebut tidak dapat tercapai.

2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan;

Pada kegiatan ini jumlah sarana angkutan laut yang direncanakan berupa *speedboat* sebanyak 1 (satu) unit yang bersumber dari dana DAK. Namun seperti yang telah diuraikan di atas bahwa seluruh kegiatan yang bersumber dari dana DAK mengalami *refocusing* dan realokasi untuk penanganan Covid-19, maka kegiatan pengadaan *speedboat* ini juga tidak dapat dilaksanakan.

3. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;
 Pada kegiatan ini terdapat indikator yang tidak dapat tercapai yaitu pelaksanaan Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar yang semula akan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII – Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun karena pandemic global Covid-19 maka BPTD Wilayah XII tidak menyelenggarakan semua jenis diklat pada tahun anggaran 2020.

Tidak terpenuhinya *output* pada beberapa kegiatan di atas tentu saja berimplikasi pada kurang optimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut di atas tentu saja harus menjadi catatan penting pada proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target yang Direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi target yang direncanakan diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air, listrik, telepon (internet)	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
4	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop	2 unit	2 unit	100	Memenuhi target
		Printer	2 bh	2 bh	100	Memenuhi target
		Lemari	1 bh	1 bh	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
		Kamera DSLR	1 set	1 set	100	Memenuhi target
5	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dokumen hasil perjalanan dinas	58 dok	58 dok	100	Memenuhi target
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	-	-	-	Anggaran mengalami refocusing
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara dan berlakunya surat kendaraan dinas	38 unit	38 unit	100	Memenuhi target
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
8	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPPD/LKjIP	2 dok	2 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen Renja	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen laporan bulanan	12 dok	12 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen laporan tahunan	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen laporan e-Monev	12 dok	12 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen laporan triwulan DAK	4 dok	4 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen SPIP	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
IV	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
9	Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Angkutan	Pengawasan dan Penertiban Angkutan	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
10	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Patroli Keselamatan Pelayaran	32 kl	32 kl	100	Memenuhi target
11	Kegiatan Penertiban Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Penertiban Parkir	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
V	Program Peningkatan					

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan						
12	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, RPPJ, dan Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	Anggaran mengalami refocusing
		Sosialisasi	5 kl	5 kl	100	Memenuhi target
		Perlengkapan Jalan, Kendaraan, dan Tata Cara Berlalu Lintas				
		Pemeliharaan Traffic Light	8 titik	8 titik	100	Memenuhi target
		Diklat APILL	-	-		Anggaran mengalami refocusing
13	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Pengendalian dan Pengamanan Saat Insidentil	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
14	Kegiatan Penataan Lalu Lintas Kawasan	Patroli LLAJ	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
15	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Kalibrasi Alat Uji	6 unit	6 unit	100	Memenuhi target
		Jumlah Kendaraan yang diuji	7700 unit	7039 unit	91,42	Tidak memenuhi target
		Upgrading Alat Uji PKB	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Diklat PKB Dasar	1 kl	-	-	Tidak memenuhi target

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2020

Dengan terpenuhinya hampir 90% program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diharapkan hal ini dapat berimplikasi pada peningkatan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat dalam memenuhi sasaran kegiatannya seperti yang tertuang pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

c. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan, karena pada tahun anggaran 2020 terjadi refocusing dan

realokasi anggaran yang mengakibatkan penyesuaian target sesuai dengan yang dapat dicapai dalam kondisi pandemi global Covid-19.

Tabel 2.4 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2020

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Untuk tahun 2020, pembangunan bidang perhubungan khususnya terkait masalah transportasi diprioritaskan pada sasaran untuk menurunkan angka kecelakaan melalui kebijakan penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan layanan angkutan. Secara umum hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Jaringan Jalan

1) Peningkatan Jalan Eksisting

a. Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah hanya fokus pada pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan khususnya pada pemeliharaan traffic light pada 8 (delapan) simpang. Karena pada tahun anggaran tersebut tidak ada pengadaan fasilitas keselamatan jalan yang disebabkan oleh terjadinya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19, dimana seluruh anggaran untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas, RPPJ, dan pagar pengaman jalan yang bersumber dari dana DAK dihapus.

b. Manajemen lalu lintas, yaitu dengan pemberlakuan titik-titik ruas jalan dilarang parkir ataupun dilarang berhenti, terutama pada ruas jalan dalam Kota Praya. Pada musim pandemi juga dilakukan patroli secara lebih intensif yang ditujukan untuk memantau kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

2) Penataan Simpang

a. Melakukan penutupan simpang pada Jalan Gajah Mada untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas;

b. Pemasangan rambu peringatan simpang, rambu hati-hati, serta rambu batas kecepatan.

2. Manajemen Perparkiran

1) Melakukan penyusunan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;

2) Penetapan daerah-daerah dilarang parkir pada badan jalan, terutama pada ruas jalan dalam Kota Praya. Hal ini dilakukan dengan menempatkan rambu-rambu larangan parkir serta melakukan pembinaan, penertiban, dan pengawasan parkir oleh petugas dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian;

3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mengelola parkir berkaitan dengan peraturan maupun terkait hak dan kewajiban mengenai perparkiran.

3. Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum

1) Pengembangan jalur angkutan umum untuk menjangkau seluruh kawasan Kabupaten Lombok Tengah dengan membuka jalur keperintisan angkutan jalan dengan trayek perintis: Praya-Kute-Awang dan Praya-Kute-Selong Belanak;

2) Mendorong ketertiban dan kedisiplinan rute Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melalui operasi-

operasi penertiban angkutan beserta ijin operasionalnya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian;

- 3) Melakukan penertiban pada Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) terkait kedisiplinan para kusir cidomo terhadap rute yang sudah ditetapkan dan melakukan pemeriksaan terkait ketersediaan perlengkapan yang harus dimiliki seperti kantong kotoran kuda. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Satpol-PP Kabupaten Lombok Tengah.

4. Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Barang

- 1) Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan di jalan serta mendorong perusahaan swasta untuk memiliki jembatan timbang untuk mengukur berat kendaraannya sebelum keluar ke jalan umum;
- 2) Melakukan pengujian kendaraan angkutan barang secara ketat dan melaksanakan operasi kelaikan kendaraan angkutan barang secara berkala;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha dan operator angkutan barang.

5. Peningkatan Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada tahun anggaran 2020, fokus kegiatan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pada upaya terakreditasinya UPTD PKB sebagai syarat untuk melanjutkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di tahun 2021. Karena berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor AJ.502/33/7/DRJD/ 2020 Tanggal 17 November 2020 menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor hanya dapat dioperasikan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.

Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2020 UPTD PKB telah melakukan berbagai persiapan untuk memenuhi persyaratan akreditasi yaitu antara lain:

- melakukan upgrading/setting pada alat uji Brake Tester dan Axle Load Meter
- pengkalibrasian pada 6 (enam) alat uji utama
- penembokan lanjutan halaman kantor UPTD PKB
- mempersiapkan anggaran pada tahun 2021 untuk memenuhi kelengkapan persyaratan lainnya, yaitu: anggaran untuk pengadaan perangkat smart card, pengadaan Buku Lulus Uji Elektronik (BLUe), rehab gedung uji, penembokan lanjutan, pengadaan dan pemasangan alat uji Side Slip Tester dan Tint Tester, dll.

Atas berbagai upaya tersebut UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah akhirnya berhasil meraih akreditasi B dari Kementerian Perhubungan, sehingga pada tahun 2021 UPTD PKB dapat terus melakukan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah melalui Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

Pada tahun 2020, pengadaan 1 (satu) unit speedboat yang direncanakan tidak dapat terlaksana. Hal ini terjadi karena anggaran pengadaan speedboat yang bersumber dari DAK ini mengalami refocusing dan realokasi untuk penanganan wabah Covid-19. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah speedboat yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tetap sebanyak 4 (empat) unit yang merupakan hasil pengadaan speedboat tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 2 (dua) unit.

Dari penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 maka dapat dicapai indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah seperti yang disajikan dalam Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Tahun			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Pemasangan rambu lalu lintas	bh	105	100	70	100	105	100	70	-
2	Pengecatan marka jalan	m ²	1606	1000	-	1000	-	-	-	-
3	Pemasangan pagar pengaman jalan	m	-	62	-	62	-	60	-	-
4	Pemasangan RPPJ	bh	12	10	-	5	12	10	-	-
5	Pemasangan cermin tikungan	bh	-	4	-	5	-	4	-	-
6	Pemasangan traffic light	unit	2	-	-	1	-	-	-	-
7	Pemasangan patok tikungan	bh	40	100	50	100	40	100	50	-
8	Alat bantu keselamatan (traffic cone, road barrier, rambu pengalih arus, dll)	bh	-	130	71	96	-	130	40	-
9	Pengamanan dan pengawalan haji, pejabat/tamu daerah, safari Ramadhan, pengamanan lebaran dan hari-hari besar lainnya, tahun baru, dan expo	bl	12	12	12	12	12	12	12	12
10	Operasional FLLAJ, pengamanan rawan pagi, rawan pasar, Bau Nyale	bl	12	12	12	12	12	12	12	12
11	Dokumen pelayanan angkutan umum	dok	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	dok	-	1	-	-	-	-	-	-
13	Dokumen RIT	dok	1	-	-	-	-	-	-	1
14	Dokumen Kajian Asal-Tujuan Perjalanan	dok	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dokumen Tatralok	dok	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SIM-PKB	unit	-	1	-	-	-	1	-	-
17	Pengaspalan PKB	pkt	-	-	1	-	-	1	1	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Tahun			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
18	Kalibrasi PKB	kl	-	-	1	-	-	-	1	1
19	Terminal/shelter	bh	-	-	-	1	-	-	-	-
20	Parkir	titik	122	127	132	137	100	80	54	74
21	Rekomendasi perijinan bidang perhubungan (perubahan plat nomor dan ijin trayek/non trayek)	jenis	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Pengawasan dan penertiban angkutan	kl	60	60	96	96	60	60	96	96
23	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	kl	-	-	2	16	-	-	2	-
24	Bus perintis	unit	-	-	5	4	-	-	5	-
25	Dokumen perijinan angkutan perairan	dok	-	-	-	1	-	-	-	-
26	Patroli keselamatan pelayaran	kl	-	-	24	48	-	24	24	48
27	Alat keselamatan pelayaran	bh	10	-	90	90	-	10	-	-
28	Dermaga tambatan perahu	bh	2	-	2	1	2	-	2	-
29	Speed boat	bh	-	2	2	2	-	2	2	-

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2019

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

2.3.1 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi, yang meliputi:
 - a. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada daerah rawan kecelakaan

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas
 - c. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan
 - d. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan serta penanganan dan penertiban parkir
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
 - f. Kurangnya kompetensi teknis serta sarana dan prasarana aparaturnya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung kelancaran pelayanan perhubungan
2. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan, yang meliputi:
- a. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi serta menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum
 - b. Fasilitas pendukung transportasi (terminal dan shelter) memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
 - c. Semakin berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) disaat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

2.3.2 Tantangan dan Peluang

Kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Kabupaten Lombok Tengah akan mengalami transformasi dalam berbagai bidang, salah satunya yakni di bidang pariwisata. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi salah satu kawasan super prioritas yang merupakan program "10 Bali Baru" yang dicanangkan oleh pemerintah pusat diharapkan akan dapat memberikan dampak positif dalam berbagai bidang. Pembangunan sirkuit berstandar internasional pada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada khususnya.

Gelaran berbagai event internasional pada kawasan tersebut membutuhkan akomodasi baik dari pembangunan infrastruktur maupun penyediaan sarana dan

prasarana transportasi yang memadai agar dapat memberikan fasilitas yang maksimal untuk para wisatawan. Kebutuhan akan sarana transportasi tersebut diperlukan sebagai sarana untuk peningkatan konektivitas antar wilayah yang menjadi salah satu tujuan pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Untuk memberikan jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas maka perlu dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan layanan di bidang perhubungan, antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan transportasi melalui penyusunan Rencana Induk Transportasi serta penyusunan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- b. Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)
- c. Pengendalian ruas jalan dengan menempatkan petugas lapangan terutama pada jam-jam sibuk
- d. Pelaksanaan studi angkutan umum

Kemudian beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan selama lima tahun ke depan antara lain:

1. Belum tercapainya beberapa target pada Renstra sebelumnya, yaitu pada indikator:
 - a. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas;
 - b. Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten;
 - c. Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten;
 - d. Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang
2. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat setiap tahunnya
3. Berkembangnya ojek online disaat pelayanan angkutan umum kurang optimal serta adanya pergeseran pemilihan moda angkutan dari angkutan massal (bus) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel) khususnya pada pelayanan angkutan jarak jauh.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan antara lain:

1. Posisi strategis Kabupaten Lombok Tengah dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas, dibangunnya sirkuit bertaraf internasional di Kawasan KEK Mandalika, serta letak Bandar Udara Internasional Lombok yang berada pada wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kegiatan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dapat mendorong perkembangan angkutan;
3. Merupakan salah satu daerah yang ditetapkan menjadi kabupaten Smart City di Indonesia.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”** dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri, dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Adapun Tujuan dari Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sedangkan Sasaran Strategis dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
5. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;
6. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya konektivitas, meningkatnya kinerja layanan perhubungan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: "**Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)**".

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 4 yaitu: **Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas.**

Kemudian dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dikaitkan dengan Misi Nomor 4 Pemerintah Daerah tersebut adalah **meningkatkan keselamatan lalu lintas** dengan indikator **jumlah daerah rawan kecelakaan**. Sedangkan Sasaran yang ditetapkan adalah **meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas** dengan indikator **V/C Rasio**.

Dengan sasaran yang telah ditetapkan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk lebih mendorong dan lebih fokus pada usaha pencapaian tujuan organisasi. Beberapa strategi dan arah kebijakan tersebut diuraikan pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju, dan Berbudaya (BERSATU JAYA)		
Misi 4	Pembangunan Ekonomi yang Berkeimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	Meningkatkan Kinerja Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan
			Pemeliharaan Perlengkapan jalan
		Meningkatkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Peningkatan Koordinasi Stakeholder Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Peningkatan Perencanaan Transportasi
			Peningkatan Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas
		Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Peningkatan Kegiatan Patroli LLAJ
			Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Parkir
		Meningkatkan Pelayanan Angkutan	Peningkatan Kinerja Layanan Angkutan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal
			Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut
		Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan			

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah seperti yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan 2 Program dengan 7 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan prioritas Urusan Perhubungan dalam Rencana Kerja Tahun 2021, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 4) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 5) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 6) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa

Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan:

- 7) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Selain itu ditetapkan 1 Program dengan 7 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan Penunjang dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- a) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis serta arah kebijakan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 yang dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6.501.057.054	DAU			7.151.162.759
2	15	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	Dishub Kab. Loteng	100	%	41.344.270	DAU		45.478.697
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dishub Kab. Loteng	35	dok	41.344.270	DAU	45.478.697
					Dokumen RKA		1	dok				
					Dokumen DPA		1	dok				
					Dokumen DPPA		1	dok				
					Dokumen Renja		1	dok				
					Dokumen LKjIP		1	dok				
					Dokumen LKPJ		1	dok				
					Dokumen LPPD		1	dok				
					Dokumen Profil Perhubungan		1	dok				
					Dokumen SPIP		1	dok				
					Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi		4	dok				
					Laporan Bulanan		12	dok				
					Laporan Triwulan		4	dok				
					Dokumen Laporan Triwulan dan Tahunan DAK		5	dok				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD yang ditindaklanjuti	Dishub Kab. Loteng	100	%	4.158.328.784	DAU		4.574.161.662
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	org	4.136.236.984	DAU		4.549.860.682
					Gaji Pokok ASN		43	org				
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja		43	org				
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Insentif Pemungutan Retribusi)		43	org				
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan SKPD dan jumlah laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	15	dok	22.091.800	DAU		24.300.980
					Laporan Keuangan Bulanan		12	dok				
					Laporan Keuangan Semesteran		2	dok				
					Laporan Keuangan Akhir Tahun		1	dok				
2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80%		100	%	217.214.000	DAU		238.935.400
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	paket	150.000.000	DAU		165.000.000
					Pakaian Dinas beserta Atribut		1	paket				
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	16	dok	12.214.000	DAU		13.435.400
					Laporan Kepegawaian		12	dok				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Laporan BMD		4	dok				
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Luar Daerah	2	org	55.000.000	DAU	60.500.000
					Diklat APILL		1	org	15.000.000			
					Diklat PPNS		1	org	40.000.000			
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	Dishub Kab. Loteng	100	%	681.105.000	DAU	749.215.500
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dishub Kab. Loteng			370.500.000	DAU	407.550.000
					Meubelair		1	paket				
					Laptop		1	paket				
					Printer		1	paket				
					Mesin Absensi Face ID		1	paket				
					NAS (Network Attached Storage) + Hard Disk		1	paket				
					Baliho (space promosi)		1	paket				
					Service Generator Set		1	paket				
					Alat Kebersihan dan alat elektronik		2	paket				
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		1	paket	37.905.000	DAU	41.695.500
					Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Dinas		1	paket				
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Luar Daerah	88	dok	272.700.000	DAU	299.970.000
					Perjalanan Dinas Es II, III, IV ke Kementrian dan Perjalanan Dinas ke Provinsi		88	dok				
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase validasi data aset OPD	Dishub Kab. Loteng	100	%	758.169.000	DAU	833.985.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Dishub Kab. Loteng	4	unit	583.169.000	DAU		641.485.900
						Kendaraan Dinas R4 Patwal		1	unit				
						Kendaraan Dinas R2 Patwal		2	unit				
						Kendaraan Dinas R2 Es IV		1	unit				
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Dishub Kab. Loteng	2	unit	100.000.000	DAU		110.000.000
						Pembangunan toilet ruang Sekretaris Dinas		1	unit				
						Pembangunan gudang rambu		1	unit				
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Dishub Kab. Loteng	1	unit	75.000.000	DAU		82.500.000
						Penataan tempat parkir angguna dan gudang rambu		1	unit				
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	Dishub dan UPTD PKB Kab. Loteng	100	%	119.896.000	DAU		131.885.600
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dishub dan UPTD PKB Kab. Loteng	12	dok	75.000.000	DAU		82.500.000
						Laporan Penyediaan Jasa Listrik		12	dok				
						Laporan Penyediaan Jasa Air		12	dok				
						Laporan Penyediaan Jasa Internet		12	dok				
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dishub Kab. Loteng	12	dok	44.896.000	DAU		49.385.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12	dok				
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Dishub Kab. Loteng	100	%	525.000.000	DAU	577.500.000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Dishub Kab. Loteng	41	unit	325.000.000	DAU	357.500.000
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		41	unit				
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajak dan perijinannya		41	unit				
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Dishub Kab. Loteng	1	unit	200.000.000	DAU	220.000.000
					Penataan ruang FLLAJ		1	unit				-
					Penataan interior kantor		1	unit				
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan	Kab. Lombok Tengah	43,91	%	2.547.389.000	DAU & DAK	2.802.127.900
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	Kab. Lombok Tengah	6,18	%	952.000.000	DAU	1.047.200.000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Lombok Tengah	215	buah	892.000.000	DAU	981.200.000
					Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas	Kec. Batukliang Utara	100	buah				
						SSA Toyang - Bermis	50	buah				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Montong Gamang, Semparu, Muncan, Darmaji	50	buah				
					Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Kawasan Desa Wisata	15	buah				
					Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Lombok Tengah	25	buah				
					Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan	Kab. Lombok Tengah	50	buah				
					Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	Kab. Lombok Tengah	100	buah				
					Survey kebutuhan fasilitas keselamatan jalan		12	kl				
					Sosialisasi perlengkapan jalan dan tata cara berlalu lintas pada SMP di 12 kecamatan		12	kl				
					Pengadaan alat survey lalu lintas		1	paket				
					Pengadaan baju zeta		2	buah				
					Study perencanaan kebutuhan transportasi di Kabupaten Lombok Tengah		1	dok				
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Perlengkapan Jalan	7	unit	60.000.000	DAU		66.000.000
					Suku Cadang Traffic Light		7	unit	60.000.000			
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia	35,29	%	-	DAU		178.200.000
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	-	unit	-	DAU		162.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang tergarap	Kab. Lombok Tengah	50,91	%	422.640.000	DAU			464.904.000
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan ijin penyeleggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lombok Tengah	12	dok	422.640.000	DAU		464.904.000
					Jumlah laporan kegiatan pengawasan, penertiban, dan pengendalian parkir dan terminal		12	dok					
					Penyusunan Perbup Pengendalian Parkir		1	dok					
					Pengadaan gembok parkir		50	buah					
					Pengadaan rompi parkir		100	buah					
					Pembelian hadiah undian karcis parkir		4	paket					
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan laik jalan	UPTD PKB	95	%	470.400.000	DAU			517.440.000
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	UPTD PKB	2	unit	232.900.000	DAU		256.190.000
					Upgrading alat uji Axle Load Meter		1	unit					
					Pembangunan sumur bor		1	unit					
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	5500	buah	137.500.000	DAU		151.250.000
					Pengadaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)		5500	buah					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara		8	unit	100.000.000	DAU		110.000.000
						Biaya Kalibrasi		8	unit				
						Biaya Pendampingan Kalibrasi		1	paket				
						Biaya Pemeliharaan Alat Uji		8	unit				
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Kab. Lombok Tengah	20	%	215.000.000	DAU		236.500.000
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	12	dok	215.000.000	DAU		236.500.000
						Jumlah laporan kegiatan pengamanan dan penertiban saat insidentil		12	dok				
						Penyusunan Perbup Sistem Satu Arah (SSA) Simpang 4 Toyang - Simpang 4 Bermis		1	dok				
						Sosialisasi SSA Simpang 4 Toyang - Simpang 4 Bermis		1	bulan				
						Operasional FLLAJ		12	bulan				
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	Kab. Lombok Tengah	20	%	295.000.000			324.500.000
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lombok Tengah	12	dok	295.000.000			324.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah laporan pengamanan dan penertiban (Patroli LLAJ)		12					
					Sosialisasi Analisis Dampak Lalu Lintas		1					
2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	Kab. Lombok Tengah	n/a	%	192.349.000			211.583.900
2	15	02	2.09	02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	12	dok	192.349.000			211.583.900
					Jumlah laporan kegiatan penertiban dan pengawasan ijin angkutan umum dan jalur lintas angkutan barang		12	dok		DAK		
					Sosialisasi perusahaan angkutan sewa penunjang KEK Mandalika		1	kl		DAK		
					Lomba Awak Angkutan Umum Teladan (AKUT)		1	kl				
					Operasional Angkutan Perintis		12	bln				
					Survey statis-dinamis angkutan umum		4	kl				
2	15	03		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Kab. Lombok Tengah	n/a	%	247.950.000			272.745.000
2	15	03	2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan PAS Kecil angkutan laut	Kab. Lombok Tengah	n/a	buah	247.950.000			272.745.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	12	dok	247.950.000		272.745.000
					Laporan kegiatan penertiban ijin dan pengawasan angkutan laut (bersama Kesyahbandaraan Teluk Awang)		12	dok				
					Sosialisasi perijinan angkutan laut dan keselamatan pelayaran		4	kl				
					Diklat kompetensi kru kapal		100	org				
					Pendataan angkutan laut		1	kl				
					Pengadaan alat keselamatan pelayaran (life jacket standard)		160	bh				
					Pemeliharaan Speedboat		4	unit				
TOTAL PAGU										9.296.396.054		10.226.035.659

Praya, 20 September 2021
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19691122 199203 1 004

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, khususnya pada daerah rawan kecelakaan;
2. Perlunya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung oleh sarana dan prasarana jalan maupun terminal yang memadai, terutama pada saat gelaran event nasional maupun internasional di KEK Mandalika;
3. Perlunya perhatian pada ketersediaan sarana dan prasarana di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terutama untuk persyaratan peningkatan akreditasi dan layanan kepada masyarakat;
4. Perlunya Langkah-langkah inovatif dalam menyelesaikan permasalahan transportasi/angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah;
5. Pengembangan transportasi laut selain diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir khususnya nelayan, adalah sebagai sarana dan prasarana penunjang perkembangan KEK Mandalika.

Untuk mencapai keberhasilan dari program Rencana Kegiatan ini, maka capaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Praya, 20 September 2021
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199203 1 004